

STRATEGI PEMERINTAH DESA BERBASIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI UMKM

Muhammad Safar Akbari

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
sakaakbari29@gmail.com

Ahmad Mustanir*

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
ahmadmustanir74@gmail.com

*Corresponding author

Abdul Jabbar

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang
jbr.nyonk1@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mencapai taraf hidup yang berkualitas melalui perubahan perilaku masyarakat. Keberadaan UMKM di setiap desa menjadi salah satu wadah dalam proses pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu usaha dalam peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Begitu pula di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, keberadaan UMKM Kuliner Mabbulo Sipeppa menjadi harapan bagi masyarakat sekitar dalam peningkatan kesejahteraan hidupnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, data dianalisis menggunakan Nvivo 12 Plus. Strategi yang digunakan oleh pemerintah desa berbasis pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui UMKM mengedepankan kebijakan dan pengambilan keputusan seperti kebijakan anggaran, pembuatan izin edar, izin usaha dan izin halal. Pemerintah desa senantiasa berkomunikasi dengan seluruh pihak terkait untuk mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat dan juga potensi daerah sebagai proses pembelajaran untuk pengembangan usaha kedepannya.

Keywords: Strategi, Pemerintah Desa, Pemberdayaan Perempuan, UMKM

Abstract

Community empowerment aims to improve the quality of human resources to achieve a quality standard of living through changes in people's behavior. The existence of MSMEs in each village is one of the vessels in the community empowerment process as one of the efforts to improve the welfare of village communities. Likewise in Bulu Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency, the existence of the Mabbulo Sipeppa Culinary MSMEs is a hope for the surrounding community in improving their welfare. The research method used was descriptive qualitative. Data were analyzed using Nvivo 12 Plus. The strategy used by the village government based on women's empowerment to increase community income through MSMEs prioritizes policies and decision-making such as budget policies, issuing distribution permits, business licenses, and halal permits. The village government always communicates with all stakeholders to develop the community and the regional potential as a learning process for future business development.

Keywords: Strategy, Village Government, Women Empowerment, MSMEs

PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwasanya masyarakat desa menjadi subyek pembangunan. Masyarakat desa memiliki sarana untuk menggerakkan prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa untuk kebahagiaan bersama (Maulidiana 2018). Pemerintah desa yang keberadaannya berhubungan langsung dengan masyarakat akan sejalan dengan otonomi daerah. Oleh karena itu, proses pemberdayaan masyarakat harus secepatnya dilakukan. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mencapai taraf hidup yang berkualitas melalui perubahan perilaku masyarakat (Lowery 2018)

Pertumbuhan ekonomi yang kuat ini hanya menguntungkan kelompok kecil perusahaan, seperti: masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan hanya menikmati dan mengambil sebagian kecil. Pada dasarnya perekonomian masyarakat pedesaan tidak hanya menguntungkan masyarakat pedesaan tetapi juga untuk membangun kekuatan ekonomi Indonesia yang berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif (Purnawati and Putri 2019).

Publikasi *Economic Forum on Global Gender Gap Issues 2017* melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat 109 dari 144 negara mengenai partisipasi perempuan dalam partisipasi ekonomi dan peluang usaha. Hal ini tentunya tentu mengidentifikasi bahwa perempuan di Indonesia tidak cukup memiliki kesempatan kerja serta peluang dalam berusaha. Rendahnya kesempatan kerja serta keterlibatan perempuan tidak hanya berdampak pada masalah perekonomian, akan tetapi akan berdampak juga pada masalah sosial. Kehadiran UMKM di setiap desa menjadi angin segar sebagai wadah untuk masyarakat desa terutama kaum perempuan untuk memiliki kesempatan kerja dan berusaha sebagai bentuk partisipasi dalam proses pembangunan desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

UMKM merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, usaha kecil dan menengah menjadi alat sangat penting untuk memajukan negara. Tentunya untuk membantu UMKM agar lebih maju membutuhkan komitmen dan koordinasi yang baik antara pemerintah, bisnis dan organisasi non-komersial serta masyarakat

setempat dengan menerapkan strategi yang aktif berbasis jaringan ekonomi (kemitraan) dan pertumbuhan UMKM memberikan dukungan aktif dan nyata melalui pengembangan sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, akses pendanaan, pemasaran dan lain-lain.

Kehadiran UMKM Kuliner Mabbulo Sipeppa merupakan bentuk dukungan dari Pemerintah Desa Bulu sebagai wadah pemberdayaan kepada masyarakat di Desa Bulu, khususnya perempuan di lingkungan UMKM Kuliner Mabbulo Sipeppa. Dalam perkembangannya UMKM Kuliner Mabbulo Sipeppa berhasil menjadi UMKM yang diminati dan terkenal di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal ini tentunya menjadikan produktivitas di UMKM Kuliner Mabbulo Sipeppa semakin meningkat dan serta pendapatan/penghasilan yang diperoleh karyawan di UMKM Kuliner juga meningkat. Melihat fenomena ini tentunya menjadi hal yang sangat menarik untuk diketahui terkait Strategi Pemerintah Desa Berbasis Pemberdayaan Perempuan Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di UMKM.

STUDI LITERATUR

Chandler mengemukakan pengertian strategi dalam (Maulidiana 2018) Strategi adalah sebuah alat yang digunakan dalam mencapai tujuan perusahaan atau lembaga yang tujuannya dalam jangka panjang serta program tindak lanjut prioritas alokasi sumber daya. Kotten dalam (Maulidiana 2018) mengemukakan bahwa strategi adalah suatu rencana seorang pemimpin dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang yang disertai dengan penyusunan cara atau upaya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sedangkan definisi strategi menurut Supriono merupakan suatu kesatuan program atau rencana organisasi atau lembaga yang disusun secara komprehensif yang tentunya diperlukan dalam semua kegiatan organisasi. Pada saat yang sama, strategi yang sudah diterapkan oleh suatu organisasi akan diterapkan sebagai basis kekuatan terpisah untuk penyesuaian dalam lingkungan yang terus berubah (Gustiman 2021).

Geoff Mulgan menyatakan, *“Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods”*. Strategi yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan sendiri, lebih mengidentifikasikan pada strategi bagi lembaga pembuat kebijakan (pemerintah). Dimana strateginya dibuat untuk dapat

berguna sebagai sistem yang akan mengatur sumber daya yang tersedia melalui lembaga publik. Menurut definisi di atas, Geoff Mulgan, memaparkan strategi pengelolaan pemerintahan dalam lima (5) indikator yaitu: *Purposes* (Tujuan), *Environment* (Lingkungan), *Direction* (Pengarahan), *Action* (Tindakan), dan *Learning* (Pembelajaran) (Christian, 2020).

Menurut Inu Kencana dalam Ficayani (2017), Pemerintah merupakan sebuah ilmu dan seni, mengapa disebut seni karena sebenarnya beberapa pemimpin mampu menjalankan pemerintahan tanpa pendidikan dan karisma dan dapat menggerakkan roda pemerintahan. Sedangkan kenapa dikatakan sebagai sebuah ilmu karena harus memenuhi semua kondisi yang telah ditentukan oleh ilmu, yakni mampu dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material serta bentuk, sistem dan spesifik dan universal (Afriansyah et al. 2023). Menurut Robert Mac Iver yang dikutip Inu Kencana dalam (Ramdan 2020) "*government is a organization of men under authority... how men can be govern*". Artinya pemerintah adalah suatu organisasi dari suatu kelompok pemegang kekuasaan dan bagaimana orang bisa diatur oleh pemerintah.

Pemerintah yang dirujuk dalam teks tersebut adalah pemerintah yang ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa, yang mengatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tampi and Tampongongoy 2021). Menurut Soemantri dalam (Ramdan 2020) mengatakan Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dengan dibantu perangkat desa. dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Perangkat Desa meliputi: Sekretaris Desa dan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaannya bidang lapangan dan pengelolaan unsur wilayah, dengan jumlah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sosial budaya setempat.

Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang sangat besar pengaruhnya. Pelaksanaannya ditujukan untuk desa-desa. Pengurus unit organisasi pemerintah desa disebut sebagai aparatur negara, bukan pegawai negeri sipil, karena beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Konsisten dengan pengertian desa sebagai kesatuan ketatanegaraan

- b. Perangkat tersebut, meskipun sering dipilih dari masyarakat desa setempat, tetapi yang mengangkat perangkat tersebut adalah pejabat yang memiliki wewenang.
- c. Tidak ditetapkan sebagai perangkat atau pejabat, karena kedudukan pegawai negeri diatur oleh undang-undang dan peraturan tertentu, yang tidak berlaku bagi aparatur pemerintah desa.

Peran Pemerintah Desa adalah mengarahkan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang dapat bertanggung jawab dan adil. Seperti yang kita tahu itu merupakan salah satu tugas pemerintah yakni menjamin pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan material desa. Tujuan pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan (Inderasari, Hamdi, and Maulana 2022).

Pemberdayaan perempuan ialah sebuah upaya untuk memberdayakan kaum perempuan dalam memperoleh akses dan kontrol dalam hal sumber daya, ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Agar kaum perempuan mampu untuk mengontrol diri dan meningkatkan rasa percaya diri dan mampu untuk ikut serta dalam memecahkan permasalahan, sehingga dapat membangun kemampuan dan keahlian. Strata perempuan akan menjadi baik dan tinggi jika perempuan mampu untuk mandiri dan mampu untuk membuat keputusan-keputusan untuk dirinya dan kehidupannya. Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan adalah upaya yang dilakukan dalam membuka kesempatan kerja atau meningkatkan potensi, bakat dan kemampuan perempuan untuk membuka usaha kecil dan perbaikan tingkat manajerial (Cross, Woodall, and Warwick-Booth 2019) (Mustanir and Hamid 2019).

Tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah mempersiapkan masyarakat untuk siap bekerja dan menjadi seorang pengusaha, karena upaya dan usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasinya kemiskinan adalah dengan bekerja dengan memberikan bekal pelatihan, menjadi bekal yang sangat penting saat memasuki dunia kerja (Purnamawati and Utama 2019) (Revell and Dinnie 2020). Pengembangan masyarakat merupakan upaya untuk memfasilitasi dan mengembangkan keahlian sosial yang berkesinambungan dan aktif berdasarkan prinsip keadilan sosial dan saling menghormati. Selain perkembangan masyarakat tersebut juga dipahami sebagai komitmen untuk memberdayakan masyarakat lapis

bawah sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan yang benar-benar yang menyangkut masa depan mereka (Brear 2020) (Astuti, Waluyo, and Subagyo 2020). Wrihatnolo dan Dwidjowijoto berpendapat bahwa sebagai sebuah proses pemberdayaan memiliki tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap pertama adalah tahap penyadaran, tujuannya adalah masyarakat dapat diberikan pencerahan dalam hal kesadaran tentang hak kepemilikan sesuatu.
2. Tahap selanjutnya adalah tahap *capacity building* atau pengkapasitasan, yaitu memberdayakan individu dan kelompok manusia untuk dapat menerima daya atau kekuatan yang diberikan.
3. Langkah terakhir adalah memberdayakan atau proses pemberian daya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan masyarakat. Pada level ini, target mendapatkan kekuatan, kekuasaan, wewenang atau kesempatan.

Pendapatan masyarakat menurut pemikiran Rosyidi dalam (Tulus, Femi. Y. Londa 2014) adalah perputaran uang yang mengalir dari dunia usaha ke masyarakat dalam bentuk upah, Hadi Prayitno dan Budi Santoso (1998:50) mengatakan bahwa strategi pembangunan negara berkembang akan lebih baik jika strategi pembangunan yang ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan sumber daya manusia, mengembangkan pedesaan, pertanian dan restrukturisasi ekonomi nasional. Adapun mengenai penataan strategi pembangunan otonom harus mengacu pada kemandirian suatu daerah di dalamnya agar pembangunan daerah dapat mencapai tujuan ekonomi nasional dan meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan sosial, mengurangi populasi penduduk miskin dan tertinggal serta mendorong partisipasi aktif masyarakat

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Pemilihan Informan menggunakan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, observasi, wawancara dengan Andi Rifai, S.Hi (Kepala Desa Bulu), Asdiati (Ketua UMKM Kuliner Mabbulo Sipeppa), Ismail Husain (Ketua BUMDes Mabbulo Sipeppa), Safri Dalle (Ketua BPD Desa Bulu) dan kajian literatur, dianalisis menggunakan Nvivo 12 Plus yang merupakan perangkat lunak untuk menganalisis data kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mengatur

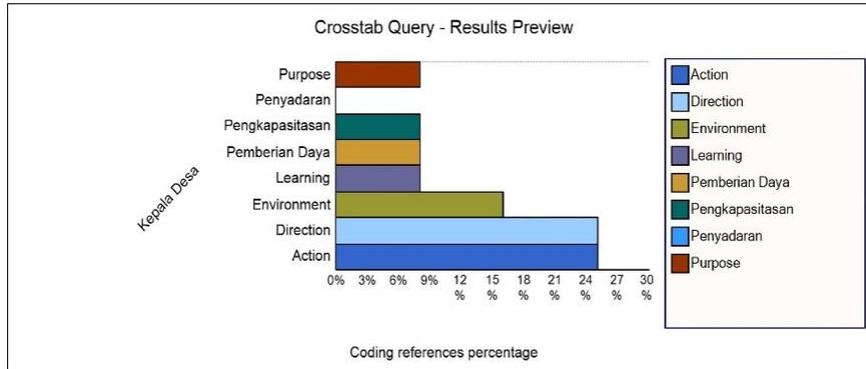
desain penelitian dan mengumpulkan data serta informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian yang menggambarkan hasil penelitian dengan bentuk diagram berdasarkan hasil wawancara.

PEMBAHASAN

Desa Bulo merupakan salah satu desa dari empat desa yang ada di Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Timoreng Panua pada tahun 1993. Desa Bulo yang awalnya merupakan hasil pemekaran tersebut kemudian dimekarkan kembali menjadi dua desa menjadi Desa Bulo dan Desa Bulo Wattang. Desa Bulo terdiri dari 2 dusun yakni Dusun Bulo dan Dusun Bulo Wattang. Desa Bulo berbatasan dengan Desa Cipotakari di sebelah timur, Desa Pattondon Salu di sebelah utara, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Bulo Wattang yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Bulo, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Talawe Kecamatan Wattang Sidenreng.

Desa Bulo merupakan salah satu desa yang memiliki banyak sekali potensi wilayah yang menjadi sumber penghasilan bagi masyarakatnya, hal ini tentunya didukung oleh kondisi geografis Desa Bulo yang kebanyakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai ladang penghasilan. Serta mengolah hasil pertanian dan perkebunan tersebut menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Mayoritas perempuan di Desa Bulo mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan untuk keberlangsungan hidup mereka, sehingga pemerintah desa juga memiliki komitmen untuk memberikan wadah kepada kaum perempuan untuk menggunakan keahlian yang mereka miliki untuk mengolah hasil pertanian dan perkebunan tersebut menjadi produk olahan yang bernilai ekonomis dan menjadi ciri khas Desa Bulo. Dalam pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada dalam rangka mencapai suatu target pemberdayaan yakni peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat perlu adanya suatu strategi yang dimiliki oleh aparat pemerintah terutama pemerintah desa dalam hal pengembangan sektor usaha yang dinilai mampu untuk menjadi penopang perekonomian masyarakat.

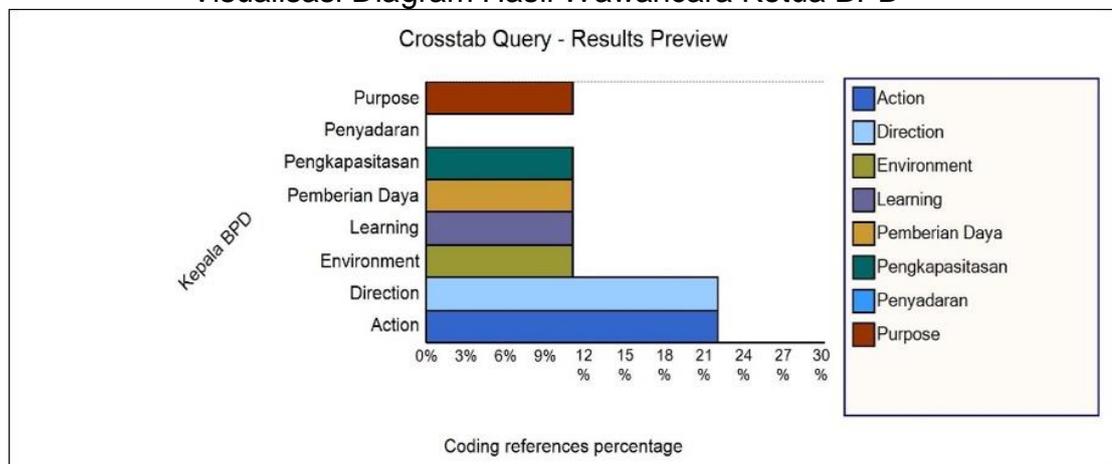
Gambar 1.
 Visualisasi Diagram Hasil Wawancara Kepala Desa



Sumber: Hasil olah data penelitian, 2023

Hasil analisis terkait strategi pemerintah desa berbasis pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan pendapatan UMKM Mabbulo Sipeppa dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Bulu menunjukkan bahwa *action* dan *direction* yang merupakan indikator dari strategi menunjukkan persentase yang lebih dominan daripada indikator lainnya sebesar 25%, dan didukung oleh indikator *environment* sebesar 16,67%. Sedangkan *purpose* dan *learning* yang menjadi indikator dari strategi memiliki persamaan persentase dengan pengkapasitasan dan pemberian daya yang merupakan indikator dari pemberdayaan perempuan sebesar 8,33%. Sementara itu indikator penyadaran berada pada persentase paling rendah sebesar 0%.

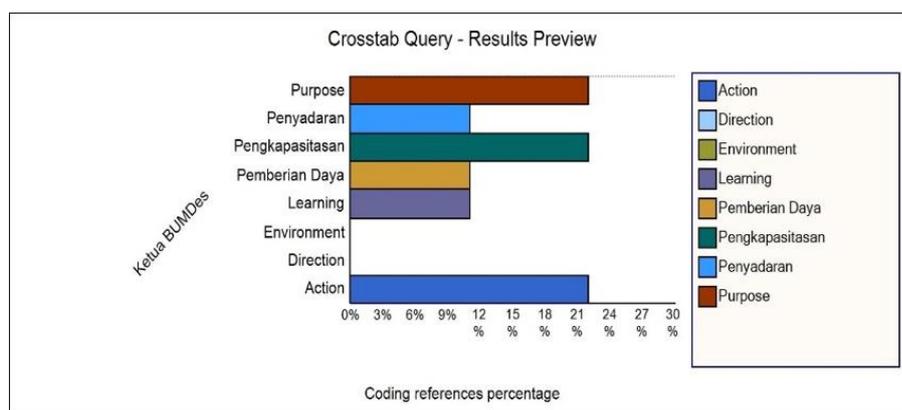
Gambar 2.
 Visualisasi Diagram Hasil Wawancara Ketua BPD



Sumber: Hasil olah data penelitian, 2023

Hasil wawancara dengan Ketua BPD Desa Bulu menunjukkan bahwa indikator *action* dan *direction* juga menempati persentase tertinggi sebesar 22,22%, dan hal menariknya dari hasil wawancara menunjukkan bahwa indikator *purpose*, *learning*, *environment*, serta indikator pengkapasitasan dan pemberian daya memiliki angka persentase yang sama yakni 11,11%. Sedangkan indikator penyadaran berada pada persentase paling rendah yakni 0%.

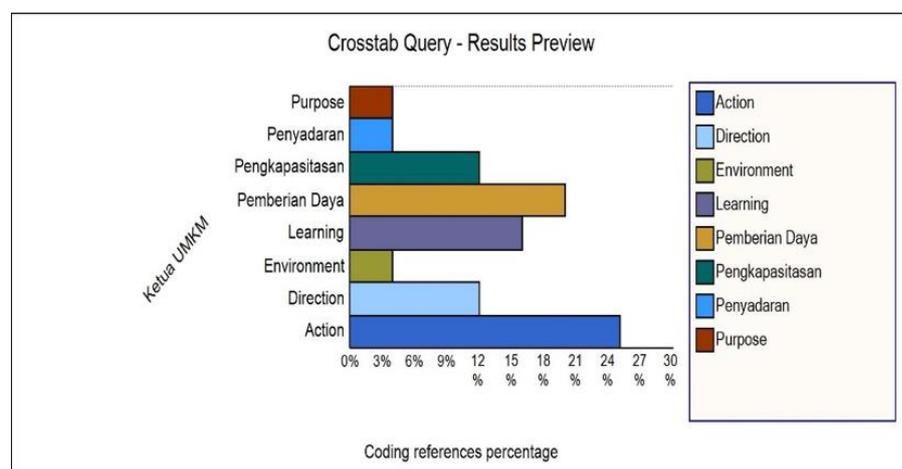
Gambar 3.
 Visualisasi Diagram Hasil Wawancara Ketua BUMDes



Sumber: Hasil olah data penelitian, 2023

Wawancara dengan Ketua BUMDes Mabbulo Sipeppa menunjukkan bahwa indikator *action*, *purpose* dan pengkapasitasan menempati persentase tertinggi sebesar 22,22%, dan didukung oleh indikator penyadaran, pemberian daya, dan *learning* sebesar 11,11 %. Kemudian indikator *environment* dan *direction* mendapatkan persentase paling rendah sebesar 0%.

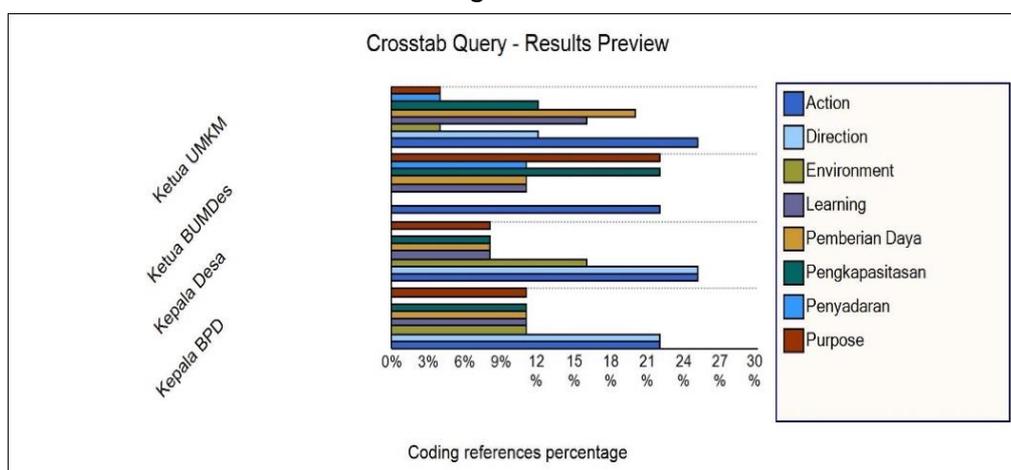
Gambar 4.
 Visualisasi Diagram Hasil Wawancara Ketua UMKM.



Sumber: Hasil olah data penelitian, 2023

Wawancara dengan Ketua UMKM Mabbulo Sipeppa menunjukkan bahwa indikator *action* memiliki persentase paling tinggi sebesar 25%, sedangkan indikator *purpose*, *environment*, serta indikator penyadaran dan *purpose* memiliki angka persentase yang sama sebesar 4,17%. Adapaun untuk indikator pemberian daya yang merupakan salah satu indikator pemberdayaan perempuan memiliki angka persentase yang lumayan tinggi sebesar 20,83%. Untuk indikator *learning* memiliki persentase sebesar 16,67% dan indikator pengkapasitasan memiliki persentase sebesar 12,5 %.

Gambar 5.
 Visualisasi Diagram Hasil Wawancara



Sumber: Hasil olah data penelitian, 2023

Dari kedelapan indikator yang terbagi dari 5 indikator strategi (*action*, *learning*, *direction*, *environment* dan *purpose*) serta 3 indikator pemberdayaan perempuan (penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberian daya) terlihat bahwa strategi pemerintah desa yang berbasis pemberdayaan perempuan dalam peningkatan pendapatan di UMKM Mabbulo Sipeppa mengedepankan indikator *action* sebesar 24,07% dalam artian pemerintah desa mengedepankan tindakan dalam pengambilan keputusan sebagai bentuk strategi yang dikeluarkan dan didukung oleh indikator lainnya (*direction* 14,81%, *learning* 12,96%, *Purpose* 9,26%, *environment* 7,41%, pengkapasitasan 12,96%) untuk menghasilkan masyarakat yang mampu untuk berdaya setelah dilakukan proses pemberdayaan terutama dalam hal peningkatan perekonomian masyarakat yang dibuktikan dengan hasil persentase 14,81% dari proses pemberdayaan (pemberian daya) adapun untuk

persentase penyadaran dalam artian kemauan masyarakat untuk diberdayakan memiliki persentase sebesar 3,7%.

Berdasarkan konsep Geoff Mulgan, terdapat 5 indikator strategi pemerintahan yakni *Purpose* (Tujuan), *Environment* (Lingkungan), *Direction* (Pengarahan), *Action* (Tindakan), dan *Learning* (Pembelajaran).

a. *Purposes* (Tujuan)

Dalam mencapai tujuan pemberdayaan, berbagai macam upaya tentunya dijalankan oleh pemerintah desa. Sebagai contoh adalah senantiasa melaksanakan pelatihan/pendampingan terkait program pemberdayaan, hal tentunya sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa :

“Berbagai macam pelatihan tentunya kami siapkan dan kami programkan mulai dari pelatihan yang bersifat 1 kali setahun ataupun pelatihan yang berkelanjutan dan tentunya bekerjasama dengan berbagai instansi terkait guna untuk mengakomodir potensi serta pengembangan kelompok yang ada”

b. *Environment* (Lingkungan)

Proses pemberdayaan masyarakat tentunya membutuhkan strategi yang baik dari pemerintah desa, salah satu contohnya pemerintah desa mampu untuk menciptakan perubahan paradigma kepada masyarakat terhadap pemberdayaan, sehingga masyarakat mau untuk diberdayakan.

Menurut Kepala Desa Bulu

“Awalnya tentunya saya berusaha untuk merubah mindset (Pemikiran) masyarakat tentang apa itu pemberdayaan dan apa manfaatnya, walaupun itu awalnya susah dikarenakan masih banyak yang merasa malu, namun saya senantiasa mencoba berkomunikasi kepada mereka untuk merubah pemikiran mereka agar mau diberdayakan dan mampu untuk menggali potensi yang mereka miliki”

Pelaksanaan pemberdayaan tentunya akan berhasil jika didukung oleh keadaan lingkungan masyarakat serta kemauan masyarakat itu sendiri hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala BPD Desa Bulu:

“Tentunya kami dan pemerintah desa selalu berkomunikasi kepada masyarakat untuk kemajuan masyarakat itu sendiri”

c. *Direction* (Pengarahan)

Salah satu faktor keberhasilan dalam proses pemberdayaan suatu kelompok atau masyarakat tentunya didukung dengan adanya pemberian motivasi dari pemerintah

setempat untuk menunjang keberhasilan suatu proses pemberdayaan. Menurut Kepala Desa Bulo

“Dari segi komunikasi tentunya kami menjalin dengan sangat baik kepada pihak UMKM, hal itu juga menjadi salah satu strategi kami selaku pemerintah desa untuk pengembangan potensi-potensi yang ada dengan cara mengajak stakeholder terkait untuk mengakomodir potensi desa dengan potensi yang dimiliki masyarakat”

Motivasi yang diberikan tentunya diharapkan sebagai pemacu kepada masyarakat untuk tetap semangat dan selalu optimis dalam melaksanakan proses pemberdayaan, hal ini tentunya sejalan dengan hasil wawancara dengan Ketua UMKM Mabbulo Sipeppa

“Kalau dari pemerintah desa sampai saat ini tentunya selalu mendukung, mengawasi, dan memberikan motivasi untuk kami pelaku UMKM agar dapat berdaya dan membantu perekonomian keluarga”

d. Action (Tindakan)

Salah satu faktor keberhasilan dan pendukung dari suatu proses pemberdayaan adalah pengambilan keputusan yang tepat dari pemerintah sebagai pengambil keputusan. Pengambilan keputusan tersebut diharapkan menjadi jalan untuk masyarakat mengeksplor dan menggali potensi yang ada dalam diri mereka, sehubungan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bulo yang mengatakan:

“Bentuk kebijakan yang kami berikan sebagai pemerintah desa yakni membuat program-program terkait pemberdayaan perempuan serta mengeluarkan kebijakan berupa kebijakan anggaran untuk pengadaan alat/sarana prasarana untuk menunjang keberlangsungan program dan unit usaha serta kami senantiasa membantu dari segi promosi dan pemasaran produk baik promosi secara offline maupun secara online”.

Bukan hanya terkait kebijakan yang dikeluarkan, akan tetapi pengambilan keputusan yang tepat juga dapat mendukung kelancaran dan perkembangan usaha, hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan stakeholder terkait. Menurut Kepala Desa Bulo :

“Bentuk strategi yang kami lakukan adalah memperkuat perihal perizinan, baik izin usaha, izin edar maupun izin halal. Karena mau sebaik apapun produk yang kami hasilkan kalau perizinannya tidak baik sudah pasti tidak terlalu dilirik oleh orang luar. Olehnya itu jika perizinan dan kemasan sudah baik dan menarik kami mengharapkan produk dari UMKM Mabbulo Sipeppa ini mampu menjadi Produk Nasional”.

Pemerintah Desa Bulo tentunya senantiasa melaksanakan program-program pemberdayaan perempuan dalam rangka untuk memberdayakan kaum perempuan di Desa Bulo, seperti pelatihan dan pendampingan untuk kelompok wanita tani,

kelompok penjahit, dan UMKM Kuliner Mabbulo Sipeppa, baik itu dalam bentuk pelatihan berupa materi maupun pengadaan alat & bahan untuk menopang keberlangsungan usaha dari setiap kelompok wanita di Desa Bulu.

e. *Learning* (Pembelajaran)

Sebagai bentuk awal sebelum proses pemberdayaan adalah proses pengidentifikasian yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk dapat mengetahui potensi-potensi yang ada di masyarakat dan dihubungkan dengan potensi daerah yang ada, sehubungan dengan hal tersebut tentunya sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa sebagai berikut:

“Kami selaku pemerintah desa tentunya sudah mengidentifikasi berdasarkan potensi yang ada di Desa Bulu ini, mulai dari potensi Pertanian, Perkebunan, dan Kuliner khususnya Kuliner Tradisional, kami juga mengupayakan hal tersebut dapat terakomodir. Sehingga masyarakat yang punya keahlian dalam mengolah potensi yang ada menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan mereka juga mempunyai wadah untuk mengakomodir hal tersebut”.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto mengemukakan bahwa dalam proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yakni, Penyadaran, Pemberian Kapasitas, dan Pemberian Daya:

a. Tahapan penyadaran

Target yang hendak diberdayakan diberikan pencerahan bahwa mereka punya hak untuk mempunyai sesuatu serta dapat mengimpementasikannya setelah dilakukan proses penyadaran sebagai bentuk keberhasilan dari tahapan tersebut.

Menurut Ketua BUMDes Mabbulo Sipeppa :

“Kalau yang saya lihat di masyarakat memang setelah pelatihan ada yang melanjutkan ada juga yang cukup sampai disitu saja, dan yang melanjutkan memang yang mau fokus terkait dari pelatihan itu”.

Terlepas dari hal tersebut dalam proses pemberdayaan juga masih banyak yang memilih untuk melanjutkan dan tetap memberikan dukungan kepada kelompok lainnya agar mampu untuk berdaya, sehubungan dengan itu menurut Ketua UMKM Mabbulo Sipeppa:

“Menegenai masalah respon dari masyarakat setelah proses pemberdayaan, sebenarnya kurang. namum dari pelaku UMKM dan Pelaku usaha-usaha tentunya tetap melanjutkan dari proses pelatihan/pemberdayaan yang sudah diberikan”.

b. Tahapan Pemberian Kapasitas

Suatu tahapan untuk memberikan kewenangan kepada kelompok atau masyarakat untuk dapat menerima daya dengan diberikan kekuasaan untuk mengatur kelompok dan dirinya sendiri serta mereka mampu untuk menjalankan usaha dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi di usaha mereka.

Menurut Ketua BUMDes Mabbulo Sipeppa :

“Untuk BUMDes sudah dilepas dalam artian sudah diberikan kewenangan untuk mengurus dan sebagai bentuk tanggung jawabnya nanti dilaporkan di laporan pertanggung jawaban BUMDes”.

“Kalau boleh dikatakan sebenarnya 100% lah, saya dan teman teman diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengembangkan UMKM”. Menurut Ketua UMKM Mabbulo Sipeppa”.

c. Tahapan Pemberian Daya

Tahapan dimana objek pemberdayaan yakni masyarakat atau kelompok dapat memanfaatkan peluang yang ada sehingga mampu untuk mendapatkan penghasilan, sehingga mereka menjadi masyarakat yang berdaya dan dapat membantu perekonomian keluarga. Menurut Ketua UMKM Mabbulo Sipeppa:

“Kalau untuk anggota UMKM sudah pasti ada penghasilan, karena selama terbentuknya UMKM kurang lebih 2 tahun ini selalu berpenghasilan dan ini merupakan hasil dari pemberdayaan yang telah kami dapatkan”.

“Pasti ada penghasilan yang mereka dapatkan setelah proses pelatihan, bagi mereka yang melanjutkan dan fokus pada usaha atau kegiatan yang dijalankan. Karena mereka kan sudah mampu untuk menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai jual”. Menurut Ketua BUMDes Mabbulo Sipeppa

Suatu bentuk keberhasilan proses pemberdayaan adalah tercapainya tujuan dari pemberdayaan yakni masyarakat atau kelompok yang diberdayakan sudah mampu untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis. Menurut Ketua UMKM Mabbulo Sipeppa :

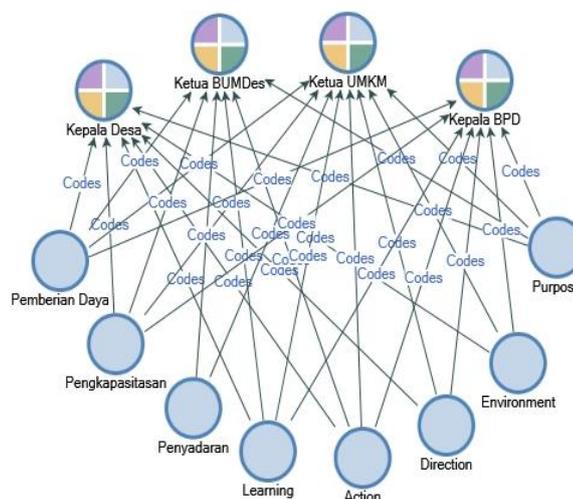
“Alhamdulillah sekali kalau kita bicara tentang peningkatan pendapatan karyawan setelah bergabung di UMKM ini, apalagi waktu kerjanya juga tidak tiap hari bahkan kadang hanya 10 hari dalam 1 bulan tapi sudah mampu menghasilkan Rp. 500.000 hingga Rp. 1.000.000”.

Dari kelima indikator strategi pemerintahan yang dikemukakan oleh Geoff Mulgen, indikator yang menjadi strategi yang dikedepankan Pemerintah Desa Bulu adalah indikator *action* (tindakan) dimana pemerintah desa mengeluarkan kebijakan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat yang bekerja

di UMKM, didukung oleh indikator *direction* (Pengarahan). Pemerintah Desa senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada masyarakat untuk tetap mau diberdayakan sehingga mereka selalu berinovasi dari motivasi dan dukungan dari pemerintah desa tersebut. Selain itu pemerintah desa juga selalu belajar (*learning*) untuk memahami kebutuhan masyarakat melalui komunikasi yang selalu terjaga untuk mengetahui potensi-potensi yang ada di masyarakat agar dapat dikembangkan dan menjadi sumber penghasilan masyarakat yang nantinya didukung keadaan lingkungan (*environment*) serta pelatihan/pendampingan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam mencapai tujuan pemberdayaan (*purpose*).

Sedangkan menurut Wrihatnolo & Dwidjowijoto yang mengemukakan tiga tahapan pemberdayaan dan tiga tahapan tersebut telah dilalui oleh Karyawan UMKM dalam proses pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa menunjukkan bahwa masyarakat sudah mampu untuk menghasilkan sesuatu sehingga dapat mencapai tujuan pemberdayaan dalam artian indikator pemberian daya sudah terlaksana dengan baik, hal tersebut tentunya didukung oleh proses pemberian kapasitas/kewenangan kepada masyarakat untuk dapat menjalankan usaha kelompok/lembaga dengan tetap mendapatkan pendampingan dari pemerintah desa, akan tetapi dalam hal ini indikator penyadaran juga menjadi salah satu faktor keberhasilan, tetapi masih ada beberapa masyarakat yang enggan untuk melanjutkan proses pemberdayaan tersebut. Hanya beberapa masyarakat yang bisa melanjutkan proses pemberdayaan salah satunya adalah Kelompok UMKM Mabbulo Sipeppa yang senantiasa selalu menjaga komunikasi antara stakeholder terkait.

Gambar 6. *Project Map* Penelitian



Sumber: Hasil olah data penelitian, 2023

KESIMPULAN

Strategi yang digunakan oleh pemerintah desa berbasis pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui UMKM Kuliner Mabbulo Sipeppa Desa Bulu yakni mengedepankan tindakan melalui bentuk kebijakan dan pengambilan keputusan yang dikeluarkan seperti kebijakan anggaran, pembuatan izin edar, izin usaha dan izin halal. Serta pemerintah desa senantiasa berkomunikasi dengan setiap lapisan agar mampu untuk mengembangkan potensi yang ada dalam masyarakat dan juga potensi daerah sebagai proses pembelajaran untuk pengembangan usaha kedepannya.

Dengan adanya dukungan strategi yang diberikan oleh pemerintah desa dapat menghasilkan output berupa masyarakat yang sudah mampu untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis dan mampu untuk menopang dan membantu perekonomian keluarga melalui proses pemberian daya dan pengkapasitasan sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai.

REFERENSI

- Afriansyah et al. 2023. *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Astuti, Sih Darmi, Dwi Eko Waluyo, and Herry Subagyo. 2020. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Sekolah Wirausaha Aisyiah Kabupaten Semarang." *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3(1): 71.
- Brear, Michelle. 2020. "Silence and Voice in Participatory Processes - Causes, Meanings and Implications for Empowerment." *Community Development Journal* 55(2): 349–68.
- Cross, Ruth, James Woodall, and Louise Warwick-Booth. 2019. "Empowerment: Challenges in Measurement." *Global Health Promotion* 26(2): 93–96.
- Ficayani. 2017. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Pasar." : 1–23.
- Gustiman, Yosep. 2021. "Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan." *Juhanperak* 2(3): 913–34.
- Inderasari, O P, S Hamdi, and I Maulana. 2022. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Suralaga Lombok Timur." *Jurnal Kebijakan ...* 17: 91–105. <http://www.jkpjournal.com/index.php/menu/article/view/256>.
- Lowery, Liza. 2018. "Developing a Successful E-Government Strategy Definition of E-Government." *Developing a Successful E-Government Strategy Liza*: 1–7.

- Maulidiana, Rena. 2018. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (Study Kasus Kredit Sahabat (Krabat) Desa Labuan Mapin Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa Tahun 2017-2018." *Bitkom Research* 63(2): 1–3. http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaengen-PIs/2018/180607-Bitkom.
- Mustanir, Ahmad, and Hariyanti Hamid. 2019. "Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Desa Dalam Perencanaan Metode Partisipatif." *Jurnal MODERAT* 5(3): 239–227. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>.
- Purnamawati, I Gusti Ayu, and Made Suyana Utama. 2019. "Women's Empowerment Strategies to Improve Their Role in Families and Society." *International Journal of Business, Economics and Law* 18(5): 119–27.
- Purnawati, L, and O I Putri. 2019. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Ekonomi Masyarakat Desa Waung." *Jurnal PUBLICIANA* 12(1): 70–92.
- Ramdan, Fitria. 2020. "Kampung Sabbeta Di Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng." *Skripsi*: 1–88.
- Revell, Philip, and Elizabeth Dinnie. 2020. "Community Resilience and Narratives of Community Empowerment in Scotland." *Community Development Journal* 55(2): 218–36.
- Tampi, Gustaaf Buddy, and Desy Tampongangoy. 2021. "Strategi Pemerintahan Desa Dalam Menjaga Kestabilan Ekonomi Masyarakat Desa Di Tengah Pandemi Covid 19 (Suatu Studi Di Desa Pusunge Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe)." *Jurnal Administrasi Publik* VII(111): 93–98.
- Tulusan, Femi. Y. Londa, Very. 2014. "Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombabiri Kabupaten Minahasa." : 92–105.
- Rifai, Andi. Wawancara dengan Muhammad Safar Akbari. 21 Juli 2023.
- Asdiati. Wawancara dengan Muhammad Safar Akbari. 22 Juli 2023.
- Husain, Ismail. Wawancara dengan Muhammad Safar Akbari. 22 Juli 2023.
- Dalle, Safri. Wawancara dengan Muhammad Safar Akbari. 24 Juli 2023.